

BAB III
DESKRIPSI DAN ANALISIS
PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM A. MALIK FADJAR

A. Pengertian Pendidikan Islam

Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inheren dengan konotasi istilah “*tarbiyah, ta’lim, dan ta’dib*” yang harus dipahami secara bersama-sama. Ketiga istilah ini mengandung makna yang mendalam menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Istilah-istilah itu pula sekaligus menjelaskan jalur pendidikan Islam: informal, formal dan non formal.

Pendidikan Islam menurut A. Malik Fadjar sendiri adalah pemberi corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang, yang berwawasan semesta, berwawasan kehidupan utuh dan multi dimensional, yang meliputi wawasan tentang Tuhan, manusia dan alam secara integratif.¹

Pengertian pendidikan Islam ini, sejalan dengan konsep Islam sebagai agama “*Rahmatan lil-alamin*”, Karena gagasan pendidikan yang berwawasan tauhid (ketuhanan) bisa menumbuhkan ideologi, idealisme, cita-cita dan perjuangan. Pendidikan yang berwawasan tentang manusia bisa menumbuhkan kearifan, kebijaksanaan, kebersamaan, dan menjunjung tinggi

¹ A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Yayasan Pendidikan Islam fajar Dunia,1991), h. 34

nilai-nilai kemanusiaan sehingga dapat menghargai dan menyayangi antar sesama manusia. Dengan pendidikan yang berwawasan alam bisa menumbuhkan semangat dan sikap ilmiah yang melahirkan pengetahuan, dan kesadaran dalam melestarikan alam.

Ketiga wawasan tersebut diharapkan dapat melahirkan kebudayaan yang berkualitas (amal salih), sebagaimana dikehendaki oleh nurani manusia. Bukan kebudayaan yang justru menumbuhkan ketakutan, kekejaman, dan menurunkan derajat kemanusiaan.

Dalam bukunya *Reorientasi Pendidikan Islam* A. Malik Fadjar menyebutkan bahwa dalam sejarah pendidikan Indonesia maupun dalam studi pendidikan, istilah “Pendidikan Islam” umumnya dipahami sebagai ciri khas jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan.² Demikian pula batasan pendidikan Islam yang ditetapkan di dalam sebuah Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional,³ yang diperinci sebagai berikut:

1. Pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendiriannya dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat keislaman.
2. Pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang memberikan pengertian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan.

² *Ibid.*, h. 31

³ UU RI No 20 Tahun 2003, Tentang SISDIKNAS, (Bandung: Fokus Media, 2003)

3. Pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas.

Dari pengertian tersebut kiranya bisa lebih dipahami bahwa keberadaan pendidikan Islam tidak sekedar menyangkut persoalan ciri khas, melainkan lebih mendasar lagi yaitu tujuan yang diidamkan dan diyakini sebagai yang paling ideal. Tujuan itu sekaligus mempertegas bahwa misi dan tanggung jawab yang diemban pendidikan Islam lebih berat lagi. Adapun hal yang dibicarakan di sini adalah jenis dan pengertian pendidikan Islam yang menyangkut ketiga-tiganya. Karena memang ketiga-tiganya itu yang selama ini tumbuh serta berkembang di Indonesia dan sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah maupun dari kebijakan pendidikan nasional. Bahkan tidak berlebihan kalau (secara politis) dikatakan bahwa kehadiran dan keberadaannya merupakan bagian dari andil umat Islam dalam perjuangan maupun mengisi kemerdekaan. Pendidikan Islam, dalam pengertian sebagaimana dikemukakan di atas, selanjutnya akan dibahas dari sudut pendekatan sistem pendidikan dan kelembagaannya sebagai “mekanisme alokasi posisional”. Artinya, bahwa sistem pendidikan dan kelembagaannya mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan peserta didiknya ke dalam posisi atau peran ideal tertentu. Sudut pendekatan ini dipakai karena sedikit banyak memiliki relevansi dengan topik pembahasannya dan terutama dengan kenyataan-kenyataan yang kini kian dirasakan oleh masyarakat luas.

Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan

pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.⁴

Dari berbagai literatur terdapat berbagai macam pengertian pendidikan Islam. Menurut Athiyah Al-Abrasy, pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, pola pikirnya teratur dengan rapi, perasaannya halus, profesional dalam bekerja dan manis tutur sapanya. Sedang Ahmad D. Marimba memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

Menurut Azyumardi Azra pendidikan Islam adalah “Suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui proses dimana individu tersebut dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sebagai *khalifah fil ard*”⁵

Dari pandangan ini, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam bukan sekedar transfer *knowledge* tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas pondasi keimanan dan kesalehan, yaitu suatu sistem yang terkait secara langsung dengan Tuhan. Jadi, dapat diutarakan bahwa konsepsi pendidikan

⁴ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung : al-Ma`arif, 1980, hal. 94

⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 32

model Islam, paradigma pendidikan Islam tidak hanya pada sebagai upaya pencerdasan semata, tetapi juga penghambaan diri kepada Tuhannya.

B. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadaNya, dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat (lihat Q. S. Al-Dzariat:56; Q.S. ali Imran: 102).

Dalam konteks sosiologi pribadi yang bertakwa menjadi *rahmatan lil 'alamin*, baik dalam skala kecil maupun besar. Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan Islam.

A. Malik Fadjar menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah “untuk melahirkan manusia yang tidak hanya memanfaatkan persediaan alam, tetapi manusia yang mampu bersyukur kepada yang membuat manusia dan alam, memperlakukan manusia sebagai khalifah dan memperlakukan alam tidak hanya sebagai obyek penderita semata tetapi juga sebagai komponen integral dari sistem kehidupan." Ini sesuai dengan tujuan pendidikan Islam secara umum yaitu membentuk "*Insan Kamil*" atau "manusia paripurna".

Tujuan khusus yang lebih spesifik menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui pendidikan Islam. Sifatnya lebih praksis, sehingga konsep

pendidikan Islam jadinya tidak sekedar idealisasi ajaran-ajaran Islam dalam bidang pendidikan. Dengan kerangka tujuan ini dirumuskan harapan-harapan yang ingin dicapai di dalam tahap-tahap tertentu proses pendidikan, sekaligus dapat pula dinilai hasil-hasil yang telah dicapai.

Tujuan dalam proses pendidikan Islam adalah idealitas cita-cita yang mengandung nilai-nilai Islam yang hendak di capai dalam proses pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam secara bertahap.

Tujuan pendidikan Islam, dengan demikian, merupakan pengembangan nilai-nilai Islam yang hendak diwujudkan dalam pribadi manusia didik pada akhir dari proses tertentu. Dengan istilah lain, tujuan pendidikan Islam menurut M Arifin adalah perwujudan nilai-nilai Islam dalam pribadi manusia didik yang diikhtiarkan oleh pendidik muslim dan berilmu pengetahuan yang sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat.⁶

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kondisi negara diperlukan manajemen pendidikan yang dapat memobilisasi segala sumber daya pendidikan. Manajemen pendidikan itu terkait dengan manajemen peserta didik yang isinya merupakan pengelolaan dan juga pelaksanaannya. Fakta di lapangan ditemukan sistem pengelolaan anak didik masih menggunakan cara-cara konvensional dan lebih

⁶ M Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), h.61

menekankan pengembangan kecerdasan dalam arti yang sempit dan kurang memberi perhatian kepada pengembangan bakat kreatif peserta didik.

Pendidikan yang baik menurut A.Malik Fadjar yaitu pendidikan yang tanggap akan perubahan zaman akan tetapi tetap berpijak kepada nilai-nilai agama dan budaya bangsa. pendidikan harus tanggap dengan perubahan zaman karena zaman sekarang dan zaman dahulu kondisinya berbeda, jadi pendidikan sifatnya tidak boleh statis akan tetapi dinamis. dan pendidikan yang berbasis lingkungan (masyarakat) dan budayanya.

Praktek penyelenggaraan pendidikan Islam selama ini sering mengalami benturan antara tradisional dan modern serta kelemahan *positioning* kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri, misalnya konsep pendidikan Islam yang memosisikan Islam dan Ilmu pengetahuan secara dikotomis. Bahkan, lebih naif lagi penyelenggaraan pendidikan Islam sering dibatasi hanya pada organisasi masyarakat Islam semata. Malik Fadjar mengatakan bahwa keberadaan sistem pendidikan Islam seharusnya ditempatkan dalam kerangka tujuan sosiologis. Artinya, bagaimana menempatkan sistem pendidikan Islam dalam alokasi posisional yang setara dengan sistem sekolah lainnya.

Kerangka posisional tersebut mengimplementasikan adanya mandat dari masyarakat yang harus dijalankan oleh sistem pendidikan Islam dengan menyalurkan anggota-anggotanya ke dalam posisi-posisi tertentu. Mekanisme alokasi posisional juga menyarankan suatu sistem pendidikan Islam memiliki kemampuan yang besar dalam menyerahkannya

sesuai selera masyarakat secara luas. Juga menyarankan adanya mobilitas yang kuat dari masyarakat untuk mengakhiri pendidikannya sampai pada jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya, dan sistem pendidikan Islam yang berkualitas.

C. Paradigma Pendidikan Islam

Terminologi paradigma dapat diartikan sebagai berikut cara pandang dan cara berpikir. Paradigma sebagai dasar sistem pendidikan adalah cara berpikir atau sketsa pandang menyeluruh yang mendasari rancang bangunan suatu sistem pendidikan. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan memang sangat terkait dengan perubahan cara berpikir dan cara pandang dalam hidup dan masyarakat, karena pendidikan itu berpengaruh dengan masa kini dan masa yang akan datang.

Paradigma baru pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang terus menerus harus dikembangkan melalui pendidikan untuk merebut kembali pendidikan IPTEK, akan tetapi tidak melupakan pendidikan agama, sebagaimana zaman keemasan dulu. Pencarian paradigma baru dalam pendidikan Islam dimulai dari konsep manusia menurut Islam, pandangan Islam terhadap IPTEK, dan setelah itu baru dirumuskan konsep atau sistem pendidikan Islam secara utuh.

Pendidikan Islam sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan adanya dakwah Islam yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan itu pula pendidikan Islam memiliki corak dan karakteristik yang berbeda sejalan dengan upaya pembaruan yang dilakukan secara terus

menerus pasca generasi Nabi, sehingga dalam perjalanan selanjutnya pendidikan Islam terus mengalami perubahan baik dari segi kurikulum, maupun dari segi lembaga pendidikan Islam yang dimaksud. Ini artinya, bahwa sesungguhnya adanya upaya perubahan walaupun sedikit benar-benar telah tampak dan terjadi secara alamiah dalam pendidikan Islam.⁷

Dalam sejarah peradaban Islam, kita tahu bahwa ada dua corak pemikiran yang selalu mempengaruhi cara berfikir umat Islam. *Pertama*, pemikiran tradisional yang berciri sufistik dan *kedua*, pemikiran rasionalis yang berciri liberal, terbuka, inovatif, dan konstruktif. Kedua corak itulah yang kelihatannya pada saat-saat kejayaan Islam berlangsung bersatu padu, saling mengisi satu sama lain. Kemudian di masa kemunduran pendidikan Islam sebagaimana dijelaskan di atas dimana pemikiran tradisional tidak mau menggunakan pola berfikir rasional yang telah diambil oleh Barat, atau yang disebut Azyumardi Azra sebagai *historical accident*, atau “kecelakaan sejarah”,⁸ yaitu ketika ilmu-ilmu umum (keduniaan) yang bertitik tolak pada penelitian empiris, rasio, dan logika mendapat serangan yang hebat dari fuqaha yang pada akhirnya menyebabkan kemunculan dikotomi ilmu Islam dan Ilmu Umum.

Dalam peta pemikiran Islam, A. Malik Fadjar mengutip pendapat Munawir Sadzali, bahwa di kalangan kaum muslimin ada empat pendapat

⁷ Suwito, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 159

⁸ Azyumardi Azra, *Rekonstruksi Kritis Ilmu dan Pendidikan Islam*, dikutip dalam Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif: Upaya Mengintegrasikan kembali dikotomi ilmu dan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 206

yang sering menimbulkan kontroversi khususnya pendidikan dalam kacamata Islam. *Pertama*, Islam sebagai agama terakhir dan penyempurna dari agama-agama wahyu sebelumnya adalah agama yang ajarannya mencakup segala aspek kehidupan umat manusia. Kalangan ini biasanya mengemukakan pernyataan, bahwa Islam mengatur dari permasalahan-permasalahan kecil, seperti adab atau tata cara masuk kamar kecil sampai pada masalah-masalah kenegaraan, kemanusiaan, sistem ekonomi dan lain sebagainya. Termasuk didalamnya adalah bidang pendidikan, kelompok ini biasanya dijuluki dengan kelompok “universalis” bersikap lebih radikal dalam memahami Islam, umumnya lebih skripturalis.

Asumsi yang mendasari kelompok ini, bahwa zaman Rasulullah adalah zaman paling baik (ideal), sehingga masa-masa sesudahnya harus merujuk ke zaman Rasulullah. Karena itu, menurut kelompok ini pendidikan Islam harus merujuk pada pendidikan sebagaimana yang secara sosiologis dicontohkan Rasulullah dan generasi sahabatnya. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengajarkan agama Islam, laki-laki dan perempuan dipisahkan dan berpakaian khas.⁹

Kedua, berpendapat bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Sedangkan urusan-urusan keduniaan, termasuk pendidikan manusia diberikan hak otonomi untuk mengaturnya berdasarkan kemampuan akal budi yang diberikan

⁹ A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam...*, h. 27

kepada manusia. Kelompok ini berpendapat pendidikan Islam itu tidak ada, melainkan yang ada adalah pendidikan Islami.

Pendidikan menurut kelompok ini secara epistemologis berada dalam kawasan yang bebas nilai, tidak mempunyai konteks dengan Islam. Islam hanya menempati kawasan aksiologis, nilai-nilai etis dalam pemanfaatan dan berada di luar struktur ilmu pendidikan. Karena itu, yang disebut pendidikan Islam adalah pendidikan yang secara fungsional mampu mengemban misi Islam, baik yang dikelola oleh kaum muslimin maupun yang bukan.¹⁰

Ketiga, Islam bukanlah sebuah sistem kehidupan yang praksis dan baku, melainkan sebuah sistem nilai dan norma (perintah dan larangan) yang secara dinamis harus dipahami dan diterjemahkan berdasarkan setting sosial dan dimensi ruang dan waktu tertentu. Karena itu, secara praksis dalam Islam tidak terdapat sistem ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya secara tersurat dan baku. Akan tetapi, manusia dalam hal ini umat Islam yang telah diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi diperintahkan untuk membangun sebuah sistem kehidupan praksis dalam segala aspeknya dalam rangka mengamalkan nilai dan norma Islam dalam kehidupan nyata. Karena itu, dalam Islam hanya terdapat pilar-pilar penyangga tegaknya sistem pendidikan Islam seperti tauhid sebagai dasar pendidikan, konsep manusia yang melahirkan yang memberi arah tentang tujuan pendidikan, serta konsep tentang ilmu yang merupakan isi dari proses pendidikan. Karena itu, tegaknya

¹⁰ *Ibid.*h. 28.

sistem pendidikan merupakan kawasan ijtihadi, dan dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam.

Dengan kata lain dalam hal pendidikan ini, Islam hanya menyediakan bahan baku, sedangkan untuk menjadi sebuah sistem yang operasional manusia diberikan kebebasan untuk membangun dan menerjemahkan. Karenanya, tidak ada pendidikan Islam yang baku melainkan manusia dirangsang untuk menciptakan sistem pendidikan yang paling ideal. Kelompok ini biasanya dipelopori oleh kalangan cendekiawan yang secara intelektual mampu menangkap “ide moral” atau hikmah diturunkannya Islam. Islam adalah pedoman hidup universal (sesuai dengan fitrah manusia), eternal (abadi), dan kosmopolit (lengkap dan mendorong untuk peradaban).¹¹

Keempat, Islam itu adalah petunjuk hidup yang menghidupkan. Islam tidak memberikan petunjuk terhadap semua aspek kehidupan manusia yang bersifat baku dan operasional. Karena hal ini akan mematikan kreatifitas dan memasung kebebasan manusia. Yang diberikan petunjuk secara rinci dan operasional oleh Islam hanyalah hal-hal tertentu yang dianggap khusus, krusial dan memang tidak memerlukan kreatifitas pemikiran manusia. Sedangkan dalam masalah-masalah lain terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Islam hanya memberikan petunjuk umum, baik berupa nilai etik, postulat atau aksiaoma maupun hipotesis sejarah. Karena itu, seperti masalah pendidikan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,

¹¹ *Ibid*, h. 29.

Islam hanya memberikan petunjuk sebagai asas, tujuan, dan nilai-nilai etis berkenaan dengan operasionalisasi bidang-bidang tersebut.¹²

Keempat pendapat tersebut sebenarnya tidak ada yang paling benar, sehingga yang satu menyalahkan yang lain. Karena persoalan pemahaman sebenarnya bersifat “relatif” kebenarannya. Sedangkan kebenaran yang absolut hanyalah Islam itu sendiri. Akan tetapi dalam kaitannya dengan persoalan hidup dan kehidupan ini menurut A.Malik Fadjar pendapat ketiga dan keempat lebih mendekati kepada prinsip-prinsip ajaran Islam, antara lain memudahkan dan mendorong kepada kemajuan.¹³

Sebagaimana diyakini oleh setiap muslim, bahwa Islam adalah agama wahyu terakhir yang mengemban misi *rahmatan lil-‘alamin*, yaitu terciptanya dunia yang makmur, dinamis, harmonis, dan lestari. Sehingga seluruh penghuninya, baik manusia maupun makhluk-makhluk lain merasa aman, nyaman dan kerasan di dalamnya.¹⁴

Dalam konsep Islam, *rahmatan lil-‘alamin* dapat tercipta secara dinamis, apabila manusia dapat mengemban fungsinya sebagai *khalifah* secara konsekuen dan penuh tanggung jawab. Dalam arti, dapat menempatkan diri secara proporsional dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan dengan alam. Islam nampaknya menempatkan manusia sebagai komponen penentu dalam sistem kehidupan dunia ini.

Menurut A. Malik Fadjar dalam konsep Islam, *rahmatan lil-*

¹² *Ibid* h. 30.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid* h.31.

'*alamin* dapat tercipta secara dinamis, apabila manusia dapat mengembang fungsinya sebagai khalifah secara konsekuen dan penuh tanggung jawab. Dalam arti, dapat menempatkan dirinya secara proporsional dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan dengan alam. Islam nampaknya menempatkan manusia sebagai komponen penentu dalam sistem kehidupan dunia ini. Kalau dianalogikan dengan sebuah permainan drama menurut beliau maka manusia sebagai khalifah atau pemeran utama, Tuhan sebagai Rabb atau skenario, dan alam sebagai sarana dan alat bantu.¹⁵

Selanjutnya beliau menegaskan bahwa agar manusia dapat berperan sebagai khalifah dan mampu mewujudkan *rahmatan lil-'alamin*, pada hakekatnya Allah memberikan pendidikan kepada manusia dengan sempurna. Allah telah menciptakan manusia dengan unsur-unsur dan perlengkapan sempurna, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan yang sesungguhnya sangat berat.

Pertama-tama Allah menciptakan manusia sebagai makhluk alamiah dengan unsur-unsur yang sama dengan unsur-unsur yang ada di alam, tetapi dengan bentuk yang paling sempurna (QS. 95 : 4, 3 :10). Sehingga baik secara fisik maupun psikis dapat mengatasi dan mampu menguasai alam lingkungan hidupnya. Kemudian Allah melengkapi manusia dengan unsur roh yang berasal dari Allah sendiri (Q.S. 15 : 29). Unsur roh inilah yang merupakan unsur pokok dalam diri manusia yang membedakannya dengan makhluk-makhluk alamiah lainnya, dan

¹⁵ *Ibid* h.32.

menyebabkan manusia mampu memikul tanggung jawab.¹⁶

Sebelum manusia memulai tugasnya sebagai *khalifah* di dunia ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Allah mengajarkan kepada manusia nama-nama (symbol-simbol dan rumus-rumus ilmu pengetahuan) tentang segala sesuatu (QS. 2 : 31). Nama-nama tersebut meliputi nama segala sesuatu yang ada di alam serta Nama-nama Allah yang indah (*Asmaul- Husna*) sebagai sifat-sifat fungsional Tuhan yang mesti dimiliki oleh manusia sebagai bekal dalam membangun dunia. Dengan pelajaran tersebut, berarti manusia sebelum lahir ke dunia (sewaktu lahir) membawa potensi untuk mengenal alam lingkungannya dan mengenal Allah. Potensi tersebut merupakan potensi untuk berbudaya dan membudayakan alam lingkungan.¹⁷

Inilah yang dimaksud *fitrah* atau potensi pembawaan, yang dengannya manusia mengalami proses tumbuh dan berkembang. Dengan potensi *fitrah* tersebut manusia melaksanakan tugas hidupnya sebagai *khalifah*. Kemudian Allah melengkapinya dengan petunjuk-petunjuk langsung kepada manusia melalui wahyu sepanjang sejarah kehidupan manusia di dunia.

Uraian di atas menjelaskan kepada kita, bahwa paradigma pendidikan Islam adalah pendidikan yang berwawasan semesta, berwawasan kehidupan yang utuh dan multidimensional, yang meliputi tentang Tuhan,

¹⁶ *Ibid.*, h.33-34.

¹⁷ *Ibid.*, h.34.

manusia dan alam secara integratif.¹⁸

Ketiga wawasan tersebut diharapkan dapat melahirkan kebudayaan yang berkualitas (amal shalih), sebagaimana dikehendaki oleh nurani manusia. Bukan kebudayaan yang justru menumbuhkan ketakutan, kekejaman, dan menurunkan derajat kemanusiaan.

Pendidikan yang idealis bagi A. Malik Fadjar adalah pendidikan integralistik, humanistik, pragmatik, dan berakar budaya yang kuat. Pendidikan yang idealistik beliau jelaskan sebagai berikut.¹⁹

Pertama, pendidikan integralistik mengandung komponen-komponen yang meliputi: Tuhan, manusia, dan alam pada umumnya sebagai suatu yang integral bagi terwujudnya kehidupan yang baik, serta pendidikan yang menganggap manusia sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan dan individu-sosial.

Pendidikan Integralistik diharapkan bisa menghasilkan manusia yang memiliki integritas tinggi, yang bisa bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhannya, yang bisa menyatu dengan dirinya sendiri (sehingga tidak memiliki kepribadian yang belah), menyatu dengan masyarakatnya (sehingga bisa menghilangkan disintegrasi sosial), dan bisa menyatu dengan alam (sehingga tidak membuat kerusakan).²⁰

Kedua, Pendidikan yang humanistik memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu.

¹⁸ *Ibid.*, h. 34.

¹⁹ *Ibid.*, h.37.

²⁰ *Ibid.*, h.38.

Sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidup. Sebagai makhluk batas antara hewan dan malaikat, ia menghargai hak-hak asasi manusia, seperti haknya berlaku dan diperlakukan dengan adil, hak menyuarkan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang dan lain sebagainya.

Pendidikan yang humanistik diharapkan dapat mengembalikan hati manusia ditempatnya semula, dengan mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai sebaik-baik makhluk, *khairu ummah*. Manusia “yang manusiawi” yang dihasilkan oleh pendidikan yang humanistik diharapkan bisa berfikir, berasa dan berkemauan, bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang bisa mengganti sifat individu, egoistik, egosentrik, dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat ingin memberi dan menerima, sifat saling menolong, sifat ingin mencari kesamaan dan lain sebagainya.²¹

Ketiga, Pendidikan pragmatik adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya, baik bersifat jasmani, seperti pangan, sandang, papan, sex, kendaraan dan lain sebagainya; juga yang bersifat rohani, seperti berfikir, merasa, aktualisasi diri, kasih sayang dan keadilan.

Pendidikan yang kodrati diharapkan dapat mencetak manusia pragmatik yang sadar akan kebutuhan hidupnya, peka terhadap masalah-

²¹ *Ibid*

masalah kemanusiaan dan dapat membedakan manusia dari kondisi dan situasi yang tidak manusiawi.²²

Terakhir, pendidikan yang berakar budaya yang kuat, yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa atau kelompok etnis tertentu. Pendidikan berakar budaya yang kuat diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya pada diri sendiri, dan membangun peradaban berdasarkan budayanya sendiri yang merupakan warisan monumental dari nenek moyangnya. Tetapi bukan orang yang anti kemodernan, yang menolak begitu saja arus transformasi budaya dari luar.²³

Di samping itu A. Malik Fadjar berpendapat pendidikan harus mempunyai arti positif bagi bangsa. Arti positif pendidikan adalah harapan bersama bangsa Indonesia, bahkan merupakan kesepakatan hukum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 20 thn 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Selanjutnya, dari keempat model pendidikan ideal yang dikemukakan di atas, dapat ditarik lagi pada disain model pendidikan Islam yang lebih operasional, yaitu:

Pertama, mendisain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Dengan demikian, visi, misi dan tujuan pendidikan, kurikulum dan materi pembelajaran, metode pembelajaran, manajemen pendidikan, organisasi dan

²² *Ibid.*, h.39

²³ *Ibid*

sumber daya pendidikan [guru dan tenaga administrasi harus disesuaikan dengan kebutuhan serta sesuai misi, visi dan tujuan pendidikan tersebut. Model pendidikan umum Islami, kurikulumnya bersifat integratif antara materi-materi pendidikan umum dan agama, sehingga mampu mempersiapkan intelektual Islam yang berfikir secara komprehensif. Atau meminjam istilah Fazlur Rahman, yaitu model pendidikan sekuler modern dan mengisinya dengan konsep-konsep Islam, untuk melahirkan intelektualisme muslim yang tangguh.²⁴

Kedua, model pendidikan Islam yang tetap mengkhususkan pada disain “pendidikan keagamaan” seperti sekarang ini. Artinya, harus mendisain ulang model “pendidikan Islam” yang berkualitas dan bermutu, yaitu : [1] dengan merumuskan visi dan misi serta tujuan yang jelas, [2] kurikulum dan materi pembelajaran diorientasikan pada kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat untuk menjawab perubahan. [3] materi pembelajaran diorientasikan pada upaya pemecahan kasus (problem solving) dan bukan dominasi ceramah [4] Manajemen pendidikan diorientasikan pada manajemen berbasis sekolah [5] organisasi dan sumber daya guru yang memiliki kompetensi dan dan professional dalam bidangnya masing-masing.²⁵

Ketiga, model pendidikan agama Islam tidak dilaksanakan di sekolah-sekolah formal tetapi dilaksanakan di luar sekolah. Artinya

²⁴ Rahmat Hana, Pendidikan Islam Alternatif Upaya Mengembangkan Madrasah, h. 13 <http://sulut.kemenag.go.id/file/file/BimasIslam/nskf1366759815.pdf> . 11/10/2014 pukul 17:00

²⁵ *Ibid*

pendidikan agama dilaksanakan di rumah atau lingkungan keluarga, mesjid dan lingkungan masyarakat (tempat-tempat pengajian dan Masjid) dalam bentuk kursus-kursus, kajian-kajian keagamaan, keterampilan beribadah dan sebagainya. Pendidikan agama akan menjadi tanggungjawab orang tua dan masyarakat.²⁶

Keempat, desain model pendidikan diarahkan pada dua dimensi, yakni: (1) Dimensi dialektika Horizontal, artinya pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam atau lingkungan sosialnya. Manusia harus mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia sekitarnya melalui pengembangan Iptek, dan (2) Dimensi ketundukan Vertikal, yaitu pendidikan selain untuk memantapkan, dan memelihara sumber daya alami, juga menjembatani dalam memahami fenomena dan misteri kehidupan yang abadi dengan Maha pencipta. Berarti pendidikan harus disertai dengan pendekatan hati, artinya pendidikan harus membangun hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan.²⁷

Keempat model pendidikan Islam yang dikemukakan di atas merupakan tawaran desain dan model pendidikan Islam yang perlu diupayakan untuk membangun paradigma pendidikan Islam dalam menghadapi perkembangan perubahan zaman modern dan memasuki masyarakat madani Indonesia. Sebab kondisi masyarakat sekarang ini lebih

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

bersifat praktis-pragmatis dalam hal aspirasi dan harapan terhadap pendidikan, sehingga pendidikan harus dinamis dalam menatap persoalan-persoalan yang dihadapi pada era masyarakat modern, post modern dan masyarakat global.

Dengan demikian, apapun model pendidikan Islam yang ditawarkan dalam masyarakat Indonesia, pada dasarnya harus berfungsi untuk memberikan kaitan antara peserta didik dengan nilai-nilai ilahiyah, pengetahuan dan keterampilan, nilai-nilai demokrasi, masyarakat dan lingkungan sosiokulturalnya yang terus berubah dengan cepat, sebab pada saat yang sama pendidikan secara sadar juga digunakan sebagai instrumen untuk perubahan dalam sistem politik, ekonomi secara keseluruhan.

D. Peran Pranata Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Di Indonesia, pendidikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal). Pada perkembangannya, ada beberapa ahli sosiologi yang menambahkan satu golongan pendidikan lagi, yaitu pendidikan yang diperoleh melalui pengalaman atau kehidupan sehari-hari (pendidikan informal).

Pranata Pendidikan adalah sistem norma untuk mengatur kegiatan di bidang pendidikan bagi generasi muda melalui sosialisasi dan interaksi

sosial. Pada hakikatnya kebudayaan seperti adat istiadat, teknologi, dan kesenian merupakan hasil interaksi antar manusia dengan lingkungannya.²⁸

Pranata pendidikan memiliki aturan dan disiplin baku yang bertujuan mempersiapkan anak didiknya melalui pengajaran dan pendidikan ilmu pengetahuan sehingga mampu berkompetensi dalam kehidupan, mampu berpikir secara ilmiah dan logis tentang segala sesuatu sehingga mampu memilah hal-hal yang baik dan buruk. Pranata pendidikan termasuk dalam *basic institutions*. Dengan pranata pendidikan, diharapkan hasil sosialisasi akan membentuk sikap mental yang cocok dengan kehidupan di masa sekarang dan yang akan datang.

Konsep pemikiran Malik Fadjar tentang peran pranata kependidikan adalah bahwa melalui pranata pendidikan, berbagai kegiatan pendidikan menjadi kekuatan riil bagi proses pembangunan bangsa. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa, untuk mengetahui peranan pranata pendidikan, berikut ini adalah pranata pendidikan:²⁹ *Pertama*, Peranan guru dan pemimpin pendidikan. Semua pihak melihat dan merasakan bahwa keberadaan serta kiprah guru dan pemimpin pendidikan dimana saja dan dari waktu ke waktu, merupakan kunci terlaksananya berbagai bentuk dan jenis kegiatan pendidikan formal dan nonformal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat (komunitas basis). Bahkan, dapat dikatakan

²⁸ Azanul Ahyan “Pranata Pendidikan” <https://prezi.com/2ko1mhm8m-f/pranata-pendidikan/> 10/10/2014 pukul 16:54

²⁹ A. Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2005) h. 104

merekalah yang paling mengetahui dan merasakan betapa berat misi dan tanggung jawab yang diemban dan harus dilaksanakan dalam rangka mencerdaskan dan memajukan peserta didiknya menjadi warga bangsa yang maju (modern) dan berkeadaban.³⁰

Peran dan tanggung jawab guru dan pemimpin pendidikan sama dengan para pemuka dan pemimpin bangsa, serta para pejabat pemerintahan. Tugas dan tanggung jawab mereka bukan sebatas pada kerja-kerja rutin dan praktis, tetapi lebih dari itu adalah : a) Menerjemahkan nilai-nilai, norma-norma, dan muatan pendidikan yang dituntut oleh masyarakat, bangsa, dan negara yang terus bergerak secara dinamis; b) Mengelaborasikan makna dan isi pendidikan sebagai praksis pembangunan bangsa sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perkembangan dan perubahan yang tengah berlangsung; dan c) Menggali dan mencari alternative-alternatif model dan jenis pendidikan yang berwawasan lingkungan, ekonomi, social dan budaya.

Kedua, Peranan pendidikan lembaga-lembaga pendidikan formal seperti sekolah, Madrasah, dan perguruan tinggi. Dunia sekolah, madrasah dan perguruan tinggi merupakan perwujudan yang dibangun dan dikembangkan atas dasar sistem dan kebijakan tertentu untuk mewujudkan pendidikan formal secara nasional. Apa yang disebut sebagai “sistem pendidikan nasional”, pada dasarnya merupakan serangkaian kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan nasional yang “berakar pada

³⁰ *Ibid.*,

kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945". Peran lembaga-lembaga pendidikan formal itu adalah memenuhi hak setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan dan sekaligus menjadi kewajiban belajar, khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Maka peran dan tanggung jawab yang paling banyak dituntut, antara lain : a) Kemampuan dalam menjalankan serangkaian kebijakan pendidikan yang telah berlaku secara nasional, baik kuantitas maupun kualitas; b) Kemampuannya dalam memenuhi dan mewujudkan pendidikan nasional secara akademik, khususnya yang berhubungan dengan mutu yang bertaraf nasional maupun internasional dan c) Kemampuannya dalam mengemban visi dan misi bangsa, khususnya yang berhubungan dengan daya dan semangat inovasi menuju bangsa dan Negara modern.³¹

Ketiga, Peranan lembaga-lembaga keagamaan sebagai wadah kegiatan pendidikan yang bersifat khusus dan nonformal, seperti pondok pesantren, tempat-tempat ibadah, dan organisasi-organisasi sosial keagamaan. Keberadaan dan kiprah lembaga-lembaga keagamaan itu terus tumbuh dan berkembang semakin kokoh serta berakar pada tataran komunitas basis (umat). Meskipun tampak "eksklusif", tapi di dalamnya menyimpan berbagai potensi yang dapat dijadikan kekuatan pendukung proses pembangunan bangsa. Peranan yang paling menonjol bisa ditunjukkan, diantaranya adalah; a) Menerjemahkan nilai-nilai dan norma-norma agama sebagai kekuatan yang mendasari cita-cita dan memotivasi berbagai kegiatan dalam seluruh aspek

³¹ *Ibid*, h.105.

kehidupan; b) Mendorong dan membimbing masyarakat dan umat ke arah kemajuan melalui ikatan-ikatan sosial dan kultural maupun tradisi-tradisi yang dimilikinya dan c) Menanamkan sifat-sifat dan perilaku yang terpuji dan luhur bagi terciptanya peradaban yang religius.³²

Keempat, Peranan pusat-pusat keilmuan sebagai wadah kegiatan penelitian, pembelajaran, dan pelatihan. Sebagai bangsa dan negara yang memiliki sumber-sumber keilmuan yang mendukung kegiatan penelitian, pembelajaran dan pelatihan yang cukup diakui dan dikagumi oleh dunia, terutama berupa kekayaan sumber daya alam, sesungguhnya lebih terbuka peluang untuk menjadi bangsa yang maju. Namun sumber-sumber keilmuan itu belum diolah dan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk dan jenis pendidikan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Peran pusat-pusat keilmuan itu, terutama adalah dalam a). Memanaj sumber-sumber keilmuan itu sebagai kekuatan yang mendukung pendidikan akademis, profesi, dan keterampilan; b) Menjembatani dan menginformasikan sumber-sumber keilmuan itu untuk memajukan dan memperbarui sistem dan kebijakan pendidikan nasional; dan c) Memelihara dan sekaligus mengembangkan sumber-sumber keilmuan itu sebagai bagian dari kekayaan dan kebanggaan bangsa dan negara.³³

Kelima, Peranan pusat-pusat seni dan budaya sebagai wadah kegiatan pendidikan dan kebudayaan, seperti museum dan sanggar-sanggar seni dan budaya yang tersebar di berbagai daerah. Boleh dikatakan berbagai

³² *Ibid.*, h.106.

³³ *Ibid.*, h.107.

museum dan sanggar seni serta budaya itu merupakan wahana secara tidak langsung memiliki arti penting dan strategis bagi proses pembangunan bangsa. Peran utamanya adalah a) Menerjemahkan nilai-nilai seni dan budaya yang dimiliki sebagai landasan proses pembangunan bangsa; dan c) Memelihara dan mengembangkan seni dan budaya sebagai kekayaan dan kebanggaan bangsa dan negara.³⁴

Selama ini peranan pranata kependidikan masih tampak bergerak sendiri-sendiri dan belum membentuk sinergi positif yang mendukung proses pembangunan bangsa. Masing-masing lebih banyak melihat dunianya sendiri dan kurang membuka dan saling memberi akses. Sehingga, makna pendidikan mengalami “penyempitan” dan “reduksi”. Bahkan “mandek”, terkurung dalam sistem sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi.

Menurut A. Malik Fadjar selama ini peranan pranata Pendidikan masih tampak bergerak sendiri-sendiri dan belum membentuk sinergi positif yang mendukung proses pembangunan bangsa. Masing-masing lebih banyak melihat dunianya sendiri dan kurang membuka dan saling memberi akses. Sehingga, makna pendidikan mengalami “penyempitan” dan “reduksi”. Bahkan “mandek”, terkurung dalam sistem sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi.³⁵

Memang tidak salah dan harus diakui, bahwa sistem pendidikan nasional yang direpresentasikan oleh sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi itu penting dan diperlukan untuk penanganan secara sistematis. Terutama

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid.*, h.108.

dalam rangka memenuhi persyaratan formal berdasarkan standar baku nasional maupun internasional (secara akademis). Namun ini tidak berarti bahwa makna dan perwujudan pendidikan ini hanya melulu dan identik dengan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Lebih-lebih dalam kaitannya dengan pendidikan sebagai praksis pembangunan bangsa. Karena memosisikan pendidikan sebagai praksis pembangunan bangsa, secara tidak langsung tersirat maksud memerankan berbagai pranata kependidikan itu dalam satu visi, misi, dan komitmen yang utuh dan terpadu.³⁶

E. Kaitan Ilmu dan Moral

Wacana mengenai hubungan diametral antara moralitas dan sikap ilmiah sebenarnya pernah menjadi topik yang diperselisihkan. Penyebabnya karena masing-masing moral dan ilmu termasuk ke dalam *genus* pengetahuan yang mempunyai karakteristik tersendiri. Apabila hakikat moral adalah petunjuk-petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, maka ilmu memiliki sifat sebaliknya. Yakni, ia senantiasa berupaya mengungkapkan realitas sebagaimana apa adanya. Verifikasi moral dan ilmu demikian hampir mendirikan ilmu sebagai pengetahuan bebas nilai, lebih-lebih yang bersifat dogmatis. Sedangkan moral selalu cenderung memaksakan nilai-nilai itu, meski terhadap argumentasi-argumentasi ilmiah sekalipun. Namun kalau dicermati secara lebih seksama, pandangan mengenai dikotomi ilmu-moral ini sesungguhnya tidak perlu diperpanjang karena dapat berakhir

³⁶ *Ibid*

dengan satu titik temu, yakni keterkaitan yang tak terpisahkan antara ilmu dan moral itu sendiri. Sebab pada kenyataannya, perkembangan ilmu memang tidak dapat dilepaskan dari etika dan moral.³⁷

Dalam pandangan Islam, ilmu dan moral adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. A. Malik Fadjar menyebutkan bahwa meskipun al-Qur'an dan hadis Nabi saw berulang kali menyuruh umat manusia mencari ilmu, tapi kunci keselamatan manusia di dunia dan diakhirat pada akhirnya tidaklah ditentukan oleh ilmu sendiri, tetapi oleh moralitas dan akhlaknya. Itulah sebabnya Nabi saw menegaskan *akhlakul karimah*. Meskipun di dalam proses penyempurnaan akhlak itu, ilmu menjadi prasyaratnya. Bahkan secara nyata di dalam al-qur'an, Allah swt mengecam sebagian kaum ilmuwan yang menggunakan ilmunya untuk mendustakan Allah. Dan dengan demikian, ilmu juga tidak menjamin menjadi petunjuk bagi pemiliknya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Albaqarah : 204

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ
 وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

Artinya: “Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras.”

Dan dalam QS. Al-hajj ayat 3 yang berbunyi:

³⁷ *Ibid.*, h. 119.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَجَدَّلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: “ Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang jahat ”

Kemudian A Malik Fadjar menjelaskan al-Quran sendiri tidak mempersoalkan ilmu sebagai pengetahuan yang bebas nilai. Hal ini terbukti dengan sifat ilmu yang multiguna. Bisa digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Ilmu juga bersifat komunal dan universal, artinya ilmu pengetahuan menjadi milik bersama, sehingga setiap orang berhak memanfaatkannya. Banyak ilmu itu tidak memberikan petunjuk bagi penyandanginya, tetapi ilmu yang sama bagi penyandang yang lain dapat pula menjadi sumber petunjuk. Atas dasar ini, Islam tetap membebaskan ilmu sebagai *hikmah* atau pengetahuan yang netral bagi penemunya, lalu dalam waktu yang bersamaan Allah swt memberikan nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam diri penggunanya independensi ilmu sedemikian ini dipisahkan dengan nyata dari penyandanginya, hingga bila semua baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia diakomodasi oleh Islam secara netral. Karena itu bagi para ilmuwan dituntut agar dalam bersikap ilmiah senantiasa menjunjung tinggi tanggung jawab professional serta sosial di tengah masyarakat. Tanggung jawab professional dan sosial tersebut adalah fenomena dimana ilmu pengetahuan dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai moral, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan.³⁸

³⁸ *Ibid.*, h. 122

F. Posisi Strategis Pendidikan Agama di tengah masyarakat modern

1. Nilai strategis Pendidikan Agama

Di era yang serba modern ini dimana kemajuan keilmuan dan teknologi tak dapat dielak lagi. Kemajuan itu tidak saja membawa manusia kepada tingkat progresivitas yang sangat tinggi, melainkan telah berkembang menjadi satu kosmologi baru yang menjadi tantangan agama. Berdasar pada keadaan obyektif inilah, orang berbicara tentang krisis agama karena kedudukannya telah digantikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perlu diketahui, bahwa kemajuan manusia yang semata-mata bertitik tumpu pada signifikansi di bidang keilmuan selamanya tidak akan memberikan kepuasan kepada kehidupan manusia. Bahkan, bila tidak memilih sikap etis dan kritis dalam pengembangannya, maka akan mendatangkan implikasi kemanusiaan yang secara negatif mempengaruhi masa depan umat manusia. Karena itu, setelah menyadari beberapa ekse negatif itu, terdapat suatu kesadaran baru untuk kembali kepada nilai-nilai agama.³⁹

Kesemuanya itu merefleksikan suatu keinginan untuk menampilkan kembali agama, baik dalam bentuknya sebagai bagian dari sistem nilai maupun dalam sifatnya yang paragdimatis dalam kehidupan manusia. Dalam kedudukannya sebagai bagian dari sistem nilai, agama hanya akan mengalami proses relativisasi sebagaimana nilai-nilai lainnya yang

³⁹ A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, h. 130.

dihasilkan melalui refleksi filosofis manusia. Padahal, semestinya agama secara epistemologis membingkai seluruh nilai lainnya.⁴⁰

Dalam konteks perubahan, menurut A. Malik Fadjar agama tidak cukup hanya ditempatkan dalam pengertian di atas. Karena itu, agenda pemikiran penting sekarang ini dalam rangka revitalisasi dan transformasi nilai-nilai agama adalah bagaimana merekonstruksi peran agama tersebut. Adanya relativisasi untuk tidak menyebut kemerosotan peran agama dalam proses perubahan disinyalir karena tidak berfungsinya peran-peran sosiologis agama secara optimal. Selama ini, dalam konteks historis-sosiologis, peran agama masih menampilkan ambivalensi dibalik adanya pengakuan terhadap peran agama. Karena itu, dalam rangka revitalisasi peran agama, agama dituntut peran optimalnya.

Dalam studi sosiologi agama, terdapat dua peran penting agama sebagaimana dikutip A. Malik Fadjar dari pendapat Thomas O’dea dalam bukunya *The Sociologi of Religion*,⁴¹ yang pertama yaitu peran *directive sistem* yaitu dimana agama ditempatkan sebagai referensi utama dalam proses perubahan, yaitu sebagai *supreme morality* yang memberikan landasan dan kekuatan etik spiritual bagi masyarakat, ketika berdialektika dalam proses perubahan. Dengan demikian, agama tidak lagi dipandang sebagai penghambat perubahan seperti dalam filsafat materialism, melainkan akan memberikan daya dorong luar biasa bagi terciptanya perubahan yang konstruktif dan humanis bagi terciptanya perubahan yang

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

konstruktif dan humanis bagi masa depan umat manusia. Peran itu dapat dilakukan manakala dalam agama tersedia formulasi-formulasi sistem nilai yang langka, yakni totalitas sistem makna yang berlaku bagi seluruh kehidupan, baik individu maupun sosial.

Peran yang kedua yaitu *defensive system* dimana agama menjadi semacam kekuatan resistensi bagi masyarakat ketika berada dalam lingkaran persoalan kehidupan yang semakin kompleks ditengah derasnya arus perubahan. Dalam konteks demikian, masyarakat akan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri dan tidak ada rasa khawatir serta ragu dalam menghadapi kehidupan. Namun perbincangan tentang peran sosiologis agama akan sia-sia, manakala hanya dilihat dari perspektif agama, sebab agama mempunyai cakupan doktrinal yang universal.⁴²

Dalam perkembangan kehidupan yang ditandai dengan semakin derasnya arus perubahan sosial dan budaya, pendidikan agama menghadapi tantangan berat untuk tetap bertahan dan meningkatkan perannya. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan agama mempunyai posisi formal yang kuat. Sebab, pendidikan agama diwajibkan untuk diajarkan mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai ke jenjang pendidikan tertinggi. Dalam hal ini yang terpenting bukan pada kedudukan formalnya, tapi pada substansi atau muatan keagamaan yang ditransformasikan dalam aktivitas pendidikan.

Persoalan yang dihadapi pendidikan agama selanjutnya terhadap

⁴² *Ibid.*, h.131

perannya menghadapi tantangan dan harapan akan peran agama yaitu bagaimana pendidikan agama mampu menghadirkan suatu konstruksi wacana keagamaan yang kontekstual dengan perubahan masyarakat. Kemudian bagaimana konstruksi wacana keagamaan tersebut mampu ditransformasikan secara sistemik dalam masyarakat.

A. Malik Fadjar memandang pendidikan agama di sekolah dari SD hingga perguruan tinggi terjadi pendidikan yang kurang menarik, terutama dari sisi materi yang diberikan serta cara penyampaian yang digunakan. Keadaan ini diperparah oleh terisolasinya atau kurang terintegrasinya pendidikan agama dengan materi pelajaran yang lain.

Dalam hal materi, pendidikan agama terlalu didominasi oleh masalah-masalah yang bersifat normatif, ritualistik dan eskatologis. Apalagi materi ini kemudian disampaikan dengan semangat ortodoksi keagamaan yang memaksa peserta didik tunduk pada suatu meta narasi yang ada, tanpa diberi peluang untuk melakukan telaah secara kritis. Pada akhirnya, agama dipandang sebagai suatu yang final yang harus diterima secara *taken for granted*.⁴³

Tidak mengherankan kemudian A. Malik Fadjar menjelaskan bahwa akhirnya pendidikan agama tidak fungsional dalam kehidupan sehari-hari kecuali hanya sebagai aktivitas verbal dan formal untuk menghabiskan materi atau kurikulum yang telah diprogramkan dengan batas waktu yang ditentukan.

⁴³ *Ibid.*, h. 132

2. Pembaruan madrasah

Madrasah selama ini menurut A. Malik Fadjar masih saja memiliki kekurangan-kekurangan di sana-sini, kebanyakan belum menduduki kualitas, posisi serta peran yang diidamkan. Baik bagi kalangan sendiri apalagi bagi lapisan masyarakat tertentu yang secara sosiologis berada pada posisi menengah dan atas. Karena itu, lembaga pendidikan madrasah masih jauh dari perannya sebagai pendidikan alternatif yang menajjikan masa depan, sehingga menurut Malik Fadjar satu persatu mengalami penyusutan karena kehilangan kepercayaan baik dari umat maupun peminatnya.⁴⁴

Menurut Malik Fadjar, pendidikan yang tidak didasarkan pada orientasi yang jelas dapat mengakibatkan kegagalan dalam hidup secara berantai dari generasi ke generasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kurang tertariknya masyarakat untuk memilih lembaga-lembaga pendidikan madrasah sebenarnya bukan karena telah terjadi pergeseran nilai atau ikatan keagamaannya yang mulai memudar, melainkan sebagian besar lembaga tersebut kurang menjanjikan masa depan dan kurang responsif terhadap tuntutan dan permintaan saat ini maupun mendatang. Menurutnya, paling tidak ada tiga hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan, yaitu: Nilai (agama), status sosial, dan cita-cita.⁴⁵

Untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan madrasah, menurut A. Malik Fadjar terkait dengan orientasinya,

⁴⁴ Mudjia Raharjo, *Quo Vadis Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2006), h.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 11

maka perlu mengadakan dua konsep pendekatan:

1. *Macrocosmis* (tinjauan *macro*), yakni pendidikan dianalisis dalam hubungannya dengan kerangka sosial yang lebih luas.
2. *Microcosmis* (tinjauan mikro) yakni pendidikan dianalisis sebagai satu kesatuan unit yang hidup dimana terdapat interaksi di dalam dirinya sendiri.

Dua pendekatan itu saling melengkapi terutama di tengah-tengah masyarakat yang semakin terbuka dan kompleks yang melahirkan interaksi dengan berbagai aspek kehidupan seperti sekarang ini. Karena itu kalau ingin menatap masa depan pendidikan madrasah Indonesia yang mampu memainkan peran strategisnya bagi kemajuan umat dan bangsa, perlu ada keterbukaan wawasan dan keberanian dalam memecahkan masalahnya secara mendasar dan menyeluruh. Hal-hal yang mendasar itu antara lain:

- a. Kejelasan antara yang dicita-citakan dengan langkah-langkah operasionalnya.
- b. Penguatan di bidang sistem kelembagaannya.
- c. Perbaikan atau pembaharuan dalam sistem pengelolaan atau manajemennya.
- d. Peningkatan sumber daya manusia yang diperlukan.⁴⁶

Begitu juga menurut Malik Fadjar, untuk melahirkan kebijakan-kebijakan pengembangan madrasah perlu diakomodasikan berbagai kepentingan masyarakat, diantaranya kebijakan pertama adalah “Bagaimana

⁴⁶ Suwito, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 226.

kebijakan itu pada dasarnya harus memberi ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat Islam”. Yakni menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh dan praktik hidup keislaman. Dengan jargon santri dapat kita katakan bahwa madrasah didirikan untuk menanamkan dan menumbuhkan akidah islamiyah putra-putri umat dan bangsa. Lebih dari itu, diharapkan agar madrasah dapat melahirkan golongan terpelajar yang bisa menjalankan peran *tafaqquh fid-din*.⁴⁷

Kebijakan kedua adalah “Bagaimana kebijakan itu memperjelas dan memperkuat keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta produktif, sederajat dengan sistem sekolah”. Porsi dari kebijakan ini tidak lain agar pendidikan madrasah sanggup mengantarkan peserta didik memiliki penguasaan *the basic* secara memadai, yaitu penguasaan pengetahuan dan kemampuan dasar dalam bidang bahasa, matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu pengetahuan sosial dan pengetahuan kewarganegaraan. Madrasah juga merupakan tempat persemaian yang baik untuk menumbuhkan kreatifitas, serta juga sebagai tempat berlatih dalam mengembangkan keterampilan bekerja.⁴⁸

Kebijakan ketiga adalah “Bagaimana kebijakan itu bisa menjadikan madrasah dapat merespon tuntutan-tuntutan masa depan”. Untuk itu madrasah perlu diarahkan kepada lembaga yang sanggup melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kesiapan memasuki era globalisasi, era

⁴⁷ A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, ..h.95

⁴⁸ *Ibid.* h.96.

industrialisasi, ataupun era reformasi.⁴⁹

Dalam hal kurikulum di Madrasah menurut Malik Fadjar, untuk menyasati pelajaran keagamaan yang jumlahnya hanya 30% madrasah sepenuhnya dapat mengembangkan, menjabarkan, bahkan menambah bahan kajian atau mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan muatan lokal, kurikulum madrasah perlu dikembangkan secara terpadu, dengan menjadikan ajaran dan nilai-nilai islam sebagai petunjuk dan sumber konsultasi bagi pengembangan mata pelajaran-mata pelajaran umum, yang operasionalnya dapat dikembangkan dengan cara memasukkan sebagian topik atau pokok-pokok bahasan mata pelajaran al-Qur'an dan al-Hadits, aqidah-Akhlak, dan sub mata pelajaran pendidikan agama Islam lainnya ke dalam IPS, IPA dan sebagainya, sehingga kesan dikotomis tidak terjadi.

Sementara itu dalam hal pengajaran, pendidikan agama merupakan suatu mata pelajaran yang bersifat khas, maka diperlukan adanya metodik khusus. Sehingga metodik khusus ini menurut Malik Fadjar dapat dibangun melalui perpaduan dari berbagai unit metode pengajaran yang ada, yang paling ideal adalah “metode integratif” yakni memasukkan metode suatu mata pelajaran ke dalam mata pelajaran yang lain.

Selanjutnya Malik Fadjar, menguraikan ide-ide kreatifnya agar madrasah menerapkan professional manajemennya, *pertama*, adanya perencanaan secara terpadu dan menyeluruh. Dalam hal ini, perencanaan

⁴⁹ *Ibid.*

berfungsi membantu memfokuskan pada sasaran, pengalokasian, kontinuitas. Dan sebagai suatu proses berfikir untuk menentukan hal yang akan dicapai, bagaimana pencapaiannya, siapa yang mengerjakannya, dan kapan dilaksanakan. Dengan demikian perencanaan juga memerlukan adanya kejelasan terhadap masa depan yang akan dicapai. Oleh karena itu, Malik Fadjar mengungkapkan bahwa dalam perencanaan ada semboyan “*Luck is the result of good planning, and good planning is the result of information well applied*”, keberuntungan adalah hasil dari perencanaan yang baik dan perencanaan yang baik adalah hasil dari informasi yang diterapkan.⁵⁰ Kedua terkait masalah pendanaan dalam pengembangan madrasah, A. Malik Fadjar memberikan solusi dengan alternatif yaitu gerakan wajib berinfak serta mengalokasikan zakat maal yang khusus untuk dana pendidikan.

3. Sintesa Pesantren dan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dan pesantren adalah dua tradisi pendidikan yang mempunyai banyak perbedaan. Perguruan tinggi merupakan gejala kota, sedangkan pesantren adalah gejala desa. Perguruan tinggi identik dengan kemodernan, sedangkan pesantren identik dengan ketradisional. Perguruan tinggi lebih menekankan pendekatan yang bersifat *liberal*, sedang pesantren lebih menekankan sikap konservatif yang berstandar dan berpusat pada sang kiai.

⁵⁰ A. Malik Fadjar, *Holistika pemikiran Pendidikan*..h. 248.

Persepsi dualism-dikotomik semacam itu mungkin saja kurang begitu tepat karena dalam kenyataannya banyak juga pesantren yang telah melakukan perubahan baik secara struktural maupun kultural. Munculnya banyak pesantren dengan klaim pesantren modern yang bisa saja terkesan superficial, bagaimana pun telah menjadi petunjuk bahwa pesantren tidak selamanya memperlihatkan perkembangan yang statis atau status quo. Maka kalau perguruan tinggi sering diberi citra yang “wah”, tidak berarti keberadaannya lebih unggul ketimbang pesantren. Bahkan, kalau dilihat dari sisi kemandirian, pesantren mempunyai kelebihan. Dan, kalau mau jujur sebenarnya lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap munculnya fenomena masyarakat pendidikan berlebih (*over-educated society*) yang dapat dilihat pada semakin membludaknya pengangguran intelektual di kota-kota sekarang ini, adalah perguruan tinggi itu.⁵¹

Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan nasional di Indonesia, agaknya tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren telah menjadi semacam *local genus*. Di kalangan umat Islam sendiri, pesantren sedemikian jauh telah dianggap sebagai model institusi pendidikan yang mempunyai keunggulan, baik pada sisi tradisi keilmuannya, yang oleh Martin van Bruinessen dinilai sebagai salah satu tradisi agung (*great tradition*), maupun pada sisi transmisi dan internalisasi moralitasnya,⁵² sebagaimana yang dikutip A. Malik fadjar dari pendapat Nurcholish Madjid

⁵¹ *Ibid.*, h. 220.

⁵² A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, ... h. 113

yang menyebutkan bahwa pertumbuhan sistem pendidikan di Indonesia akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh pesantren-pesantren itu. Sehingga lanjut beliau perguruan tinggi tidak akan berupa UI, IPB, UGM, Unair, Brawijaya, dan lain-lain. Tetapi mungkin Universitas Tremas, Krapyak, Tebuireng, Bangkalan, Lasem, Gontor, dan sebagainya. Kemungkinan ini ditarik kesimpulan oleh Nurcholish Madjid setelah melihat dan membuat kiasan secara kasar dengan pertumbuhan sistem pendidikan di negara-negara Barat yang terkenal adalah berasal dari cikal-bakal perguruan keagamaan. Namun, seandainya lanjut beliau kita tidak pernah dijajah pesantren-pesantren tidak begitu jauh terperosok ke dalam daerah pedesaan yang terpencil seperti sekarang melainkan berada di kota-kota pusat kekuasaan ekonomi, sekurang-kurangnya tidak terlalu jauh dari sana, sebagaimana halnya sekolah-sekolah keagamaan di Barat yang kemudian tumbuh menjadi Universitas-universitas.

Pendapat Nurcholish Madjid di atas mungkin terkesan *klise* atau gagasan yang utopis bagi orang yang sudah terlanjur terbingkai dalam wacana modernism. Akan tetapi, sekali lagi, dengan mempertimbangkan kelebihan yang dimilikinya, bukan tidak mungkin pesantren akan dilirik sebagai alternatif di tengah pengapnya suasana pendidikan formal di Indonesia, termasuk juga perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan formal yang paling tinggi.

Namun demikian, tidak berarti pesantren lepas dari kelemahan. Justru dalam zaman yang ditandai dengan cepatnya perubahan di semua

sektor dewasa ini, pesantren menyimpati banyak persoalan yang menjadikannya agak tertatih-tatih, kalau tidak malah kehilangan kreatifitas, dalam merespon perkembangan zaman. Beberapa pesantren yang ada saat ini, masih kakau (*rigid*) mempertahankan pola salafiah yang dianggapnya *shopisticated* dalam menghadapi persoalan eksternal. Padahal, sebagai suatu institusi pendidikan, keagamaan dan sosial, pesantren dituntut melakukan kontekstualisasi tanpa harus mengorbankan watak aslinya. Diantara kelemahan pesantren yaitu:⁵³

Pertama, dari segi kepemimpinan pesantren secara kukuh masih terpola dengan kepemimpinan yang sentralistik dari hierarkis yang berpusat pada satu orang Kiai. Ihtwal pendirian pesantren memang mempunyai sejarah yang unik. Berdirinya pesantren biasanya atas usaha pribadi kiai. Maka dalam perkembangan selanjutnya dia menjadi figur pesantren. Pola semacam ini tak pelak mengimplikasikan sistem manajemen yang otoritarianistik. Pembaruan menjadi hal yang sangat sulit dilakukan karena sangat bergantung pada sikap sang kiai. Pola seperti ini pun akan berdampak kurang prospektif bagi kesinambungan pesantren di masa depan. Banyak pesantren yang sebelumnya populer, tiba-tiba ‘hilang’ begitu saja karena sang kiai meninggal dunia.⁵⁴

Kedua, kelemahan di bidang metodologi. Telah umum diketahui bahwa pesantren mempunyai tradisi yang kuat di bidang transmisi keilmuan klasik. Namun karena kurang adanya improvisasi metodologi, proses

⁵³ A. Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*,..h. 221.

⁵⁴ *Ibid*,h.222.

transmisi itu hanya melahirkan penumpukan keilmuan.

Ketiga, terjadinya disorientasi, yakni pesantren kehilangan kemampuan mendefinisikan dan memosisikan dirinya di tengah realitas sosial yang sekarang ini mengalami perubahan yang demikian cepat. Dalam konteks perubahan ini, pesantren menghadapi dilema antara keharusan mempertahankan jati dirinya dan kebutuhan menyerap budaya baru yang datang dari luar pesantren.⁵⁵

Belakangan ini kita menyaksikan terjadinya sintesis atau konvergensi antara pesantren dan perguruan tinggi, maka hal itu dipandang sebagai perkembangan yang konstruktif. Seperti diketahui belakangan ini banyak pesantren yang mendirikan perguruan tinggi, atau sebaliknya perguruan tinggi mendirikan pesantren. Di beberapa kota mulai didirikan pesantren yang bernuansakan dunia perguruan tinggi, meskipun di dalamnya tidak ada jenis pendidikan yang secara formal disebut perguruan tinggi. Di Surakarta misalnya terdapat Pondok pesantren Hj. Nuriyah Sobron, yang didirikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Di sumenep, Madura, Pesantren An-Nuqayah mendirikan sekolah Tinggi keagamaan An-Nuqayah (STIKA). Di Paiton, Probolinggo Pesantren Nurul Jadid mendirikan Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAINJ). Di Malang, terdapat pesantren al-Hikam yang santrinya dari kalangan mahasiswa. Masih di Malang, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dan STAIN Malang mendirikan Ma'had Ali Sunan Ampel, yang mampu menampung dan

⁵⁵ *Ibid.*, h.223

mewajibkan ribuan mahasiswa semester pertama dan kedua (satu tahun penuh) untuk belajar bahasa Arab dan Inggris intensif. Yang menarik lagi adalah ide dari CIDES tentang pendirian pesantren politeknik. Perkembangan lainnya yang perlu dicermati, adalah pertumbuhan pesantren kilat yang menjadi *trend* di beberapa kota di Indonesia seperti di Surabaya dan Jakarta.⁵⁶

Fenomena apa ini sebenarnya? Kenapa dua institusi pendidikan pesantren dan perguruan tinggi yang tidak saja mencerminkan perbedaan secara institusional, tapi juga filosofis dan cultural, tiba-tiba saling mendekat dan menariknya terjadi konvergensi? Barangkali inilah yang disebut dengan zaman *pasca modern* atau postmodern. Dengan meninggalkan penjelasan disekitar epistemologi *postmodern*, di era ini kita menyaksikan suatu bentuk realitas dunia yang mulai memperlihatkan suatu unitas, tapi sekaligus didalamnya ada pluralitas. Misalnya, kecenderungan besar (*mega-trend*) terjadinya globalisasi yang menjadikan dunia lain menjadi transparan. Namun dalam globalisasi ini pula, kita dihadapkan pada persoalan pluralitas, yang tidak lagi dunia hanya dapat dibagi secara dualism-dikotomis. Dalam kehidupan kultural, kita menyaksikan saling mendekatnya antara wacana tradisional dan modern. Dalam kehidupan agama dimensi spiritualitas dan mistisisme mulai mendapatkan perhatian. Dunia pendidikan tampaknya tidak dapat melepaskan diri dari arus besar ini. Maka pola pendidikan lama yaitu pendidikan yang bercorak tradisional di

⁵⁶ A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, ... h. 117

satu pihak dan pendidikan yang bercorak modern dipihak lain kini mulai dikritik banyak orang, karena hanya menghadirkan pribadi yang pincang (*split personality*).⁵⁷

Perguruan tinggi mempunyai keunggulan dari sisi rasionalitas dan ditambah dengan pengayaan di bidang *skill* tapi minus pengayaan moral, dalam kenyataannya hanya akan menghasilkan manusia cerdas, tapi kurang mempunyai kepekaan etik dan moral. Sebaliknya, pesantren mempunyai keunggulan dari sisi moralitas, tetapi minus tradisi rasional. Meskipun pesantren mampu melahirkan pribadi yang tangguh secara moral, tetapi lemah secara intelektual.

Dengan memperhatikan implikasi tersebut, maka sudah waktunya dicari usaha kearah terciptanya suatu sintesa, konvergensi atau sinergitas, sehingga dapat dicapai kesatuan antara moralitas dan rasionalitas.⁵⁸

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dimana terlihat jelas dualism-dikotomi antara perguruan tinggi yang mempunyai keunggulan dari sisi sisi rasionalitas dan ditambah dengan pengayaan di bidang *skill* tapi minus pengayaan moral, dalam kenyataannya hanya akan menghasilkan manusia cerdas, tapi kurang mempunyai kepekaan etik dan moral. Sebaliknya, pesantren mempunyai keunggulan dari sisi moralitas, tetapi minus tradisi rasional. Meskipun pesantren mampu melahirkan pribadi yang tangguh secara moral, tetapi lemah secara intelektual.

Tentu tidak hanya dalam bentuknya yang bersifat fisik semata,

⁵⁷ A. Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, ... h. 225.

⁵⁸ *Ibid.*,

karena sintesa semacam ini tidak akan mendapatkan hasil yang ideal. Melainkan sintesa tersebut harus menggambarkan integrasi keilmuan yang diharapkan mampu melakukan dekonstruksi terhadap realitas keilmuan yang bersifat dualism-dikotomi.

Hal ini bukan persoalan sederhana. Karena menuntut kita untuk membongkar akar-akar teologis-filosofis terjadinya dualism-dikotomi tersebut. Dalam pandangan A.Malik Fadjar sudah waktunya merekonstruksi wacana keilmuan yang selama ini terpilah-pilah secara *rigid* antara ilmu-ilmu agama di satu pihak dengan ilmu-ilmu umum di pihak lain.

Jika dilakukan pengkajian ulang terhadap konsep ilmu dalam al-Qur'an, maka akan segera nampak jelas cacat teologis dan filosofis pembedangan keilmuan yang bersifat dualism-dikotomis itu. Dalam sebagian besar ayat-ayat al-Qur'an, demikian Mahdi Ghulsani menjelaskan, konsep ilmu secara mutlak muncul dalam maknanya yang masih umum (*generic*). Lihat misalnya, QS Al-Baqarah [2] : 31, QS Yusuf [12] : 76, dan An-Nahl [16]:70, QS Al-Zumar [39] : 9. Bahkan klasifikasi ilmu ke dalam ilmu agama dan non agama (umum), menurut Murtadha Muthahhari, akan menyebabkan kesalahan memandang (*miskonsepsi*) bahwa ilmu "non-agama" terpisah dari Islam, dan tampak tidak sesuai dengan watak universalitas agama Islam yang menyatakan dapat merahmati kehidupan semesta ini.⁵⁹

Jika demikian masalahnya, maka sintesis antara perguruan tinggi

⁵⁹ *Ibid.*, h.227

dan pesantren menghadapi persoalan yang cukup serius, karena kedua institusi tersebut sudah terlanjur dikembangkan dalam dualism-dikotomis. Namun masalah tersebut dapat segera dituntaskan jika ada keberanian moral dan intelektual dari semua pihak yang berkepentingan untuk menggagas sintesis antara perguruan tinggi dan pesantren dalam kerangka kesatuan ilmu tadi.⁶⁰

Disamping persoalan keilmuan di atas, persoalan lain yang perlu dipikirkan adalah masalah manajemen dan kepemimpinan, pembentukan tradisi baru, dan keterkaitan institusi dengan perkembangan masyarakat, sehingga sintesis yang diinginkan betul-betul menyeluruh, bukan atifisial.

4. Islam sebagai Disiplin Ilmu

Dalam pelaksanaan pendidikan Agama di Indonesia ada beberapa hal yang seringkali menjadi sorotan. Menurut A. malik fadjar permasalahan tersebut yaitu *Pertama*, masalah materi atau muatan (*content*) pendidikan agama.⁶¹ Materi pendidikan agama yang bersumber dari ajaran Islam dinilai hanya menekankan pada dimensi teologis dalam pengertian sempit dan ritual ajaran Islam. Bahwa dimensi teologis dan ritual merupakan masalah yang penting, telah menjadi kesadaran dan keyakinan dalam keberagaman umat manusia.

Akan tetapi kritik kemudian muncul, karena dimensi teologis dan ritual dalam pelaksanaan pendidikan agama tidak diletakkan dalam suatu kekayaan wacana. Kajian teologis berhenti pada persoalan ketuhanan yang

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*,h. 51

bersifat mistik-ontologis yang tidak berhubungan sama sekali dengan realitas kemanusiaan. Iman sebagai kajian utama dalam pendidikan agama lebih banyak diorientasikan kepada upaya mempertahankan aqidah. Jarang sekali keimanan dikaitkan dengan persoalan yang lebih bersifat kontekstual dalam kehidupan manusia. Kepedulian kepada masalah kemiskinan misalnya, dianggap bukan dari proses aktualisasi keimanan.

Kemiskinan wacana juga terjadi pada dimensi ritual pengajaran dan pendidikan agama, yaitu masih terpakunya pada bagaimana mengajarkan keterampilan beribadah. Karena itu, pendidikan agama dipandang dari dimensi ritual ini masih jauh dalam memberikan pengayaan spiritual, etik, dan moral. Akibatnya, peserta didik secara verbal dapat memahami ajaran Islam serta terampil melaksanakannya, tetapi kurang menghayati kedalaman maknanya.

Permasalahan yang *kedua* menurut A. Malik Fadjar yaitu persoalan yang berhubungan dengan kerangka metodologi.⁶² Jika dibandingkan dengan disiplin keilmuan lainnya, pelaksanaan pendidikan agama masih terpaku pada model konvensional yang lebih menekankan penggunaan metode ceramah sebagaimana layaknya sebuah pengajian yang cenderung monolog dan doktrinatif. Dalam keadaan demikian, pendidikan lebih merupakan sebagai perambahan dan pengayaan individu pendidik saja. Padahal, peserta didik yang telah mempunyai potensi agama (*sense of religion*) perlu dikembangkan dalam keakraban wacana melalui proses perenungan yang dalam dan proses

⁶² *Ibid.*, h. 52

dialogis yang produktif dan kritis.

Dalam konteks tersebut, peserta didik dibiarkan melakukan perambahan batin dan intelektual, sehingga kelak menemukan dalam dirinya kedewasaan dalam beragama, baik dalam hal afeksi religiusnya maupun dimensi intelektualnya. Maka peran pendidikan disini hanya sebagai mitra dialog bagi peserta didik. Tidak ada tempat bagi pendidik, pertama-tama menganggap apa yang menjadi pemahamannya terhadap ajaran agama Islam sebagai kebenaran mutlak, yang dalam proses berikutnya peserta didik didoktrin dengan apa yang telah menjadi pemahamannya.

Permasalahan *ketiga* yaitu sebagai akibat adanya kelemahan pertama dan kedua tersebut, menurut A. Malik Fadjar, menyebabkan munculnya persoalan pendidikan agama kurang terintegrasi. Atau terjadi dualism-dikotomi dengan disiplin keilmuan yang lain.

Permasalahan ketiga ini dapat dilihat dalam dua hal, *Pertama*, pendidikan agama tidak pernah dikaitkan dengan disiplin keilmuan lainnya, kecuali penekanan yang berlebihan terhadap dimensi teologis dan spiritual. *Kedua*, agama dalam pendidikan agama jarang sekali dijelaskan dari sudut pandang ilmu yang lain, seperti ekonomi, politik, filsafat, antropologi dan lain sebagainya. Pendidikan agama yang pada sisi lain merupakan studi agama atau studi Islam, sesungguhnya akan mengundang daya tarik jiwa menyertakan disiplin ilmu lain dalam menjelaskan ajaran dan fenomena keagamaan.⁶³

⁶³ *Ibid.*, h. 53

Beranjak dari permasalahan dikotomi antara pendidikan agama dan keilmuan lainnya inilah kemudian A. Malik Fadjar mencoba menyoroti persiapan pendidikan Agama yang disebut terakhir dengan melakukan pengkajian ulang terhadap IDI (Islam sebagai disiplin Ilmu) sebagai pendekatan di dalam pendidikan agama yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan agama dengan disiplin keilmuan yang lain.

Beliau mengungkapkan :

Tujuan dari IDI ini sebagaimana dirumuskan oleh Ahmad Muflih Saefudin, salah satu Anggota Tim Penyusun buku IDI, sebagai berikut: (1) Membuktikan kebenaran agama dalam disiplin ilmu; (2) Membenarkan formula ilmu sebagai produk pemikiran yang sesuai dengan atau bertitik tolak dari tata nilai atau norma agama; (3) Menyanggah formula ilmu yang memiliki hakekat kebenaran, tapi masih merupakan hipotesa, (4) Merintis terciptanya ilmu (konsep ilmiah) yang bersumber pada tata nilai atau norma Agama, baik sebagai asumsi atau sebagai bukti *scientific proof*.⁶⁴ (bukti ilmiah-penulis).

Sebelum dikembangkan sebagai pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan agama di perguruan tinggi, gagasan untuk mengintegrasikan wawasan normatif agama dengan disiplin keilmuan modern telah menjadi bahan diskursus intelektual kalangan cendekiawan dan ilmuwan muslim yang selanjutnya banyak dikenal dengan Islamisasi Pengetahuan (*Islamization of knowledge*).

Meskipun begitu gagasan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh cendekiawan dan ilmuwan Muslim termasuk Fazlur Rahman. Namun menurut A.Malik Fadjar gagasan ini tetap saja mengundang daya tarik, karena mengisyaratkan suatu pergumulan di kalangan umat Islam, lebih-lebih

⁶⁴ *Ibid.*, h. 54

kalangan pemikirnya dalam melakukan orientasi terhadap kandungan Al-Qur'an dan sunnah dari perspektif ilmu pengetahuan yang selama ini belum dielaborasi lebih serius.

Dalam konteks semua itu, Al-Qur'an sendiri sesungguhnya sebagai sumber motivasi yang dapat menggerakkan umat Islam untuk melibatkan diri dalam kerja dan perkembangan Ilmu pengetahuan. Banyaknya kata *'ilm* beserta kata jadiannya yang jumlahnya sekitar 780 kata (A. Malik fadjar mengutip dari perkataan oleh Mahdi Gulsani) menjadi bukti otentik tingkat apresiasi Al-Qur'an terhadap ilmu pengetahuan.

Dalam pandangan al-Qur'an, kerja ilmu pengetahuan bukan sekedar dimaksudkan untuk membaca hasil ciptaan Allah secara deskriptif, semata diletakkan sebagai obyek ilmu, apalagi seperti paradigm keilmuan modern yang menolak penjelasan metafisis dan filosofis terhadap alam kosmik. Lebih dari itu, ilmu pengetahuan dalam pandangan al-Qur'an perlu diarahkan secara teologis, etis, dan moral untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara manusia dengan Allah sebagai sumber pengetahuan serta untuk membantu manusia menjalankan tugas kekhalfahannya di muka bumi (QS. 45: 3-4. 35:39, 45:12).⁶⁵

Dengan demikian, ilmu pengetahuan dalam Islam pada tataran metafisis-filosofis dan praksisnya sangat kaya dengan pertimbangan teologis, spiritual, etis dan moral yang dalam paradigm keilmuan modern direduksi sedemikian rupa, semata-mata untuk mempertahankan utopia obyektivitas ilmu.

A. Malik Fadjar menegaskan lagi bahwa kerangka teologis dan filosofis inilah yang dijadikan titik tolak utama dalam mengintegrasikan ilmu-ilmu modern dengan Islam yang kemudian juga dikembangkan di perguruan

⁶⁵ *Ibid.*, h.55

tinggi dengan menggunakan pendekatan IDI. Bidang ilmu yang mendapat perhatian demikian beragam seperti ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, serta disiplin keilmuan yang dimasukkan dalam jenis *natural sciences*.

Kemudian beliau pun memberikan penilaian terhadap usaha yang dilakukan untuk melakukan integrasi, umumnya respon yang diberikan masih dalam bentuk refleksi-refleksi kritis terhadap produk pemikiran keilmuan modern. Dan karena itu, lanjut beliau integrasi yang dihasilkan masih lebih banyak berada dalam tataran metafisi-filosofis, dan belum menunjukkan suatu hasil *baby of knowledge* yang dapat memberikan gambaran secara utuh tentang ilmu pengetahuan yang digali dari Islam.⁶⁶

Hal ini nampaknya juga terjadi pada pendidikan agama yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan IDI, yaitu keberanian pada tahapan metafisis filosofis. Penekanan pada dimensi metafisis-filosofis ini penting dengan suatu landasan kerja keilmuan sangat tergantung pada asumsi metafisis-filosofis yang berkaitan dengan aspek teologis, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan, tetapi dirasa kurang memadai kalau tidak dilakukan pada tahap teoritisasi dengan melakukan kegiatan oleh A. Malik Fadjar meminjam konsep Kuntowijoyo dengan sebutan *Quranic Theory Building*.

Kemudian A. Malik Fadjar mengemukakan bahwa untuk kepentingan tersebut, Al-Qur'an yang telah menyediakan kerangka teologis

⁶⁶ *Ibid.*, h. 57

dan filosofis di bidang ilmu pengetahuan, selain juga kaya dengan pernyataan-pernyataan normatif perlu diformulasikan lebih lanjut menjadi teori-teori yang empirik dan rasional, seperti yang ditempuh oleh ilmu-ilmu modern.⁶⁷

5. Pendidikan Islam yang menjanjikan masa depan

Membahas pendidikan dalam konteks dinamika sosial kultural masyarakat merupakan bidang kajian yang sangat luas, sehingga memerlukan berbagai kerangka analisis dari disiplin keilmuan lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Disini pendidikan diletakkan dalam konteks yang bersifat makro, yaitu pendidikan sebagai proses kebudayaan. Sebagai proses kebudayaan, maka yang perlu disadari bahwa pendidikan tidak mungkin mengisolasi dirinya dari perkembangan dan transformasi, baik secara kultural, sosial maupun struktural.

Mengutip pendapat Sanapiah Faisal, A. Malik Fadjar melihat dari perspektif fungsional sebuah teori yang berpandangan bahwa masyarakat merupakan satuan sistem yang saling tergantung dan berhubungan, pendidikan dituntut melakukan penyesuaian terus menerus dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, pendidikan juga harus memainkan peran yang terarah sejalan dengan karakteristiknya selaku institusi teleologis.⁶⁸

Pergeseran dalam pandangan masyarakat saat ini terhadap

⁶⁷ *Ibid.* h. 58.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 76.

pendidikan yaitu menginginkan pendidikan yang seiring dengan tuntutan masyarakat (*social demand*) yang berkembang dalam skala yang lebih makro. Saat ini, masyarakat melihat pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan terhadap perolehan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks waktu sekarang.

Saat ini masyarakat sudah mulai selektif dalam memilih lembaga pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Perubahan demikian merupakan akibat dari rangkaian perubahan yang terjadi dalam skala makro. Artinya perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dalam bidang yang lain mempengaruhi pula pandangan dan pilihan masyarakat terhadap pendidikan. Inilah yang disebut masyarakat sebagai kesatuan sistem.

Perubahan masyarakat secara dinamis akan mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap pendidikan. Pendidikan yang akan dipilihnya sudah barang tentu yang dapat mengembangkan kualitas dirinya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sebaliknya, pendidikan yang kurang memberikan janji masa depan tidak akan mengundang minat atau antusiasme masyarakat.

Beranjak dari dinamika masyarakat tersebut maka pendidikan yang akan dipilih oleh masyarakat adalah pendidikan yang memberikan kemampuan secara teknologis, fungsional, individual, informatif, dan terbuka. Dan yang lebih penting lagi kemampuan secara etik dan moral yang dapat dikembangkan melalui agama.

Dari semua rangkaian pembaruan di atas, pada akhirnya kita

mempertanyakan posisi dan peran pendidikan Islam di Indonesia. Dalam konteks inilah akan dijumpai betapa pendidikan Islam yang dari segi kuantitas menunjukkan perkembangan yang dinamis mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi menghadapi berbagai persoalan. Tidak saja pada persoalan tataran normatif filosofisnya, tetapi juga menyangkut orientasi kultural di masa depan. Rangkaian persoalan itu tidak dapat dipisahkan, karena terdapat kaitan yang bersifat *causal relationship*. Karena itu langkah penyelesaiannya harus bersifat menyeluruh dan tidak bisa dengan cara parsial atau kasuistik.⁶⁹

Pendidikan Islam dalam pengertian sebagaimana dikemukakan di atas, merujuk pada sejarah dan perkembangannya di Indonesia pada masa lalu, dimana sebagian besar masyarakat dalam memahami arti pendidikan Islam memang hanya sebatas pada ciri khas pendidikan yang mengandalkan Agama Islam sebagai ciri utamanya. Dalam artian bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengajarkan kepada anak didiknya tentang bagaimana beribadah dan menjalankan ajaran Agama Islam dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, dari sudut pendekatan sistem pendidikan dan kelembagaan, diarahkan sebagai “mekanisme alokasi posisional”. Artinya, sistem pendidikan dan kelembagaannya mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan peserta didiknya ke dalam posisi atau peran ideal tertentu.⁷⁰

Dengan adanya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dalam

⁶⁹ *Ibid.*, h. 79

⁷⁰ A. Malik Fadjar, *Madrasah Dan Tantangan Modernitas*, (Bangung: Mizan, 1998) h.3

berbagai jenis dan jenjang pendidikan sesungguhnya sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama umat Islam. Bahkan, hal itu kini terasa sebagai kebutuhan yang sangat mendesak terutama bagi kalangan muslim kelas menengah ke atas yang secara kuantitatif terus meningkat belakangan ini.

Melihat dari kondisi tersebut A. Malik Fadjar kemudian melihat pendidikan dari sudut pendekatan sistem pendidikan dan kelembagaannya sebagai “mekanisme alokasi posisional”. Artinya, sistem pendidikan dan kelembagaannya mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan peserta didik ke dalam posisi atau peran ideal tertentu sudut pendekatan ini dipakai karena sedikit banyak memiliki relevansi dengan topik bahasannya, dan terutama dengan kenyataan-kenyataan pendidikan yang kini kian dirasakan oleh masyarakat luas. Kenyataan-kenyataan ini menurut A. Malik Fadjar mengutip dari Waskito Tjiptosasmito cukup berpengaruh, baik pada penilaian maupun penerimaan masyarakat terhadap pendidikan.

Pertama, sistem pendidikan dan kelembagaan lebih merupakan cermin keadaan masyarakat. *Kedua*, lembaga sekolah dan perguruan tinggi yang mempunyai kemampuan dasar dalam menyalurkan lulusannya sesuai dengan harapan masyarakat, akan dikukuhkan kedudukannya secara lebih kuat lagi sebagai mekanisme alokasi. Sejalan dengan hal ini, akan berlaku suatu dalil bahwa semakin besar kemungkinan suatu sekolah atau perguruan tinggi mengantarkan peserta didik atau mahasiswanya ke posisi masyarakat yang terpendang, maka semakin besar arus peserta didik/mahasiswa untuk masuk ke sekolah atau perguruan tinggi itu. *Ketiga*, orientasi alokasi

posisional akan berdampak pada munculnya dorongan yang kuat di kalangan anggota masyarakat untuk mencapai tingkat pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini bisa dipahami karena mereka yang memiliki pendidikan yang semakin tinggi itu akan memiliki “peluang” lebih terbuka untuk memasuki lembaga sosial ekonomi.⁷¹

Akhirnya, orientasi alokasi posisional juga mendorong masyarakat untuk memilih sekolah dan perguruan tinggi atas dasar “taraf” dan “mutu” dalam jajaran yang sama. Begitu pula dengan kebijakan yang ditempuh Prof.H.A. Mukti Ali sewaktu menjabat Menteri Agama (1972-1977) melalui SKB Tiga Menteri (Menteri Agama, Mendikbud, dan Menteri dalam Negeri) yang intinya memberikan kesempatan yang sama kepada tiap-tiap warga Negara untuk mendapat pendidikan, termasuk lulusan dari madrasah dapat masuk ke sekolah atau perguruan tinggi umum.⁷²

Bertolak dari pendekatan sistem pendidikan dan kelembagaan pendidikan sebagai mekanisme alokasi posisional sebagaimana di atas, segera dapat dipertanyakan posisi dan peran pendidikan Islam dengan keragaman lembaga yang dimilikinya, mulai yang berbentuk madrasah dan sekolah sampai dengan berbentuk perguruan tinggi. Secara jujur harus kita akui bahwa kehadiran madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi yang pendirian dan pengelolaannya berafiliasi pada ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan persis atau badan-badan/yayasan-yayasan perguruan Islam, kebanyakan belum mampu menduduki kualitas, posisi, dan peran yang

⁷¹ A. Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, ...h. 243-244.

⁷² *Ibid.*, h.244

diidamkan, baik dari kalangan sendiri apalagi lapisan masyarakat tertentu yang secara sosiologis berada pada posisi menengah dan atas. Pendidikan Islam tampaknya masih dalam posisi “cagar budaya” untuk mempertahankan paham-paham keagamaan tertentu, belum mampu menumbuhkan mobilitas antar generasi ke generasi. Karena itu, lembaga-lembaga tersebut masih jauh dari perannya sebagai pendidikan alternatif yang menjanjikan masa depan.

Sebuah Keniscayaan bahwa kehadiran lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dalam berbagai jenis dan jenjang yang pendidikan itu sesungguhnya sangat diharapkan oleh berbagai pihak, terutama umat Islam. Bahkan, hal itu terasa sebagai kebutuhan yang sangat mendesak terutama bagi kalangan Muslim kelas menengah ke atas yang secara kuantitatif terus meningkat belakangan ini. Fenomena sosial yang sangat menarik ini mestinya bisa dijadikan tema sentral kalangan pengelola lembaga pendidikan Islam dalam melakukan pembaruan dan pengembangannya. Namun, yang kita saksikan justru sebaliknya, diberbagai tempat banyak lembaga pendidikan Islam, terutama yang tergolong kelas pinggiran satu persatu mengalami penyusutan karena kehilangan kepercayaan, baik dari umat maupun peminatnya. Sementara itu, lembaga-lembaga pendidikan yang berlatar belakang keagamaan berbeda tapi dikelola secara professional dan menempatkan pada konteks kemasyarakatan yang lebih luas, memperlihatkan perkembangan yang demikian pesat sehingga keberadaannya semakin kukuh.

Kenyataan itu secara tidak langsung menuntut para pengelola pendidikan Islam untuk lebih bersikap rasional dan berorientasi kepada

kebutuhan masyarakat luas. Apalagi sekarang, mempersiapkan SDM di masa mendatang dan bukan semata-mata sebagai alat untuk membangun pengaruh politik atau alat dakwah dalam arti sempit. Oleh karena itu, persoalan dunia pendidikan sebenarnya termasuk peka dan rawan. Pendidikan yang tidak didasarkan pada orientasi yang jelas dapat mengakibatkan kegagalan dalam hidup secara berantai dari generasi ke generasi.

Kurang tertariknya masyarakat untuk memilih lembaga-lembaga pendidikan Islam sebenarnya bukan karena telah terjadi pergeseran nilai atau ikatan keagamaannya yang mulai memudar, melainkan karena sebagian besar lembaga tersebut kurang menjanjikan masa depan dan kurang responsif terhadap tuntutan dan permintaan saat ini maupun mendatang. Padahal, paling tidak ada tiga hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan, yaitu nilai (agama), status sosial, dan cita-cita. Masyarakat yang terpelajar akan semakin beragam pertimbangannya dalam memilih pendidikan bagi anak-anaknya. Hal ini berbeda dengan kondisi *tempo doeloe* yang serba terbatas dan terbelakang.

Tempo doeloe pendidikan lebih merupakan model untuk membentuk maupun pewarisan nilai-nilai keagamaan dan tradisi masyarakatnya. Artinya, kalau anaknya sudah mempunyai sikap positif dalam beragama dan dalam memelihara tradisi masyarakatnya, maka pendidikan dinilai sudah menjalankan misinya. Tentang seberapa jauh persoalan keterkaitan dengan kepentingan ekonomi, ketenagakerjaan, dan sebagainya merupakan persoalan kedua. Akan tetapi, masyarakat yang sudah semakin terdidik dan terbuka,

pada umumnya lebih rasional, pragmatis, dan berpikir jangka panjang. Dan karenanya pula, ketiga aspek tersebut (nilai, status sosial, dan cita-cita) dijadikan pertimbangan secara bersama-sama. Bahkan, dua pertimbangan terakhir (status social dan cita-cita) cenderung lebih dominan.

Mewujudkan, mengatur serta mengarahkan sebuah lembaga pendidikan yang dapat menjamin masa depan anak bangsa adalah bukan hal yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Untuk mewujudkan semuanya tentunya membutuhkan waktu, tenaga dan dana yang tidak sedikit, dan perlu menentukan perencanaan-perencanaan yang matang.

Karena itu, jika kita ingin menatap masa depan pendidikan Islam yang mampu memainkan peran strategis dan memperhitungkannya untuk dijadikan pilihan, maka perlu ada keterbukaan wawasan dan keberanian dalam memecahkan masalah-masalahnya secara mendasar dan menyeluruh, seperti berkaitan dengan hal-hal berikut ini: *Pertama*, kejelasan antara yang dicita-citakan dengan langkah operasionalnya; *Kedua*, Pemberdayaan kelembagaan yang ada dengan menata sistemnya; *Ketiga*, Perbaikan, pembaharuan dan pengembangan dalam sistem pengelolaan atau manajemen; *Keempat*, Peningkatan SDM yang diperlukan.⁷³

G. Tentang Pendidikan Muhammadiyah

Dalam pandangan A. Malik Fadjar, model-model pendidikan Muhammadiyah, baik yang berbentuk sekolah, madrasah, maupun

⁷³ *Ibid.*, h.250.

perguruan tinggi merupakan upaya nyata dalam menampilkan citra pendidikan Islam dan sekaligus dalam meningkatkan keislaman umat Islam Indonesia. Terlepas dari segala kekurangan dan kelemahannya, kehadiran pendidikan Muhammadiyah sangat berperan dalam memperkaya sistem politik pendidikan nasional di Indonesia.

Keberhasilan Muhammadiyah itu tak lepas dari landasan pendidikan yang dikembangkan KH. Ahmad Dahlan dengan menempuh pendekatan terpadu antara : (a) analisa historis; (b) analisa ilmiah; dan (c) analisa normatif-filosofis. Dengan pendekatan tiga unsur secara terpadu itu, KH. Ahmad Dahlan mampu memecahkan kebekuan dan mencanangkan sistem pendidikan Islam yang oleh Belanda disebut sebagai kekuatan luar biasa bagi proses Islamisasi di Indonesia.⁷⁴

Ironisnya, belakangan ini pada pendidikan Muhammadiyah sendiri terjadi semacam kepincangan, bahkan nyaris mengarah kepada kemandegan. Menurut pengamatan A. Malik Fadjar, salah satu faktor penyebabnya adalah bahwa pendekatan yang ditempuh sekarang ini lebih menekankan pendekatan analisa historis, sehingga tidak mampu lagi memprediksi dan merancang bagaimana bentuk dan nilai-nilai sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama yang dituntut generasi dan masyarakat sekarang maupun mendatang.

Sejauh yang mampu diamati dan dirasakan A. Malik Fadjar, keadaan lembaga pendidikan Muhammadiyah saat ini jika dibandingkan dengan

⁷⁴ Abd. Rohim Gazali dan Dhorifi Umar, *Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar: Cemerlang dalam Gagasan, Sukses dalam Pelaksanaan*, dikutip dalam Choirul Fuad Yunus, *Pemikir Pendidikan Islam Biografi Sosial Kultural*, (Jakarta: PT. Pena Cita satria,), h.116

keadaan sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, lebih banyak baru bernilai monumental, dalam arti cerminan sejarah masa silam. Akibatnya keberadaannya tidak mampu menempati posisi alternatif ditengah-tengah pergumulan yang sedang terjadi di dunia pendidikan.⁷⁵

Menurut A. Malik Fadjar, K.H. Ahmad Dahlan lebih banyak memperhatikan persoalan kultural dibandingkan struktural. Misalnya, model-model pengajiannya tidak harus menggunakan nama yang kearab araban, malah menggunakan nama Rebo Legi, Selasa Kliwon, dan sejenisnya. Lebih dari itu dalam rangka mencapai obsesi atau cita-citanya K.H. Ahmad Dahlan tidak segan-segan mengadopsi model pendidikan modern sejauh dapat membawa kemajuan bagi umat Islam. Bahkan beliau memperlihatkan kejelian, kecerdasan dan keberanian dalam melakukan inovasi, karena gagasan maupun paktek pembaruan pendidikannya yang mengadopsi konsep pendidikan kolonial Belanda, meski substansinya tetap merujuk pada norma-norma ajaran Islam. Adaptasi yang dilakukan mengembangkan sistem persekolahan dengan metode, kurikulum isi, pengelolaan kelasnya menggunakan sistem persekolahan modern. Lembaga-lembaga pendidikan agama di lingkungan Muhammadiyah, pada perkembangan selanjutnya, memakai sebutan atau nama-nama yang dipakai di sekolah-sekolah Belanda seperti HIS untuk Sekolah Dasar, MULO untuk Sekolah Menengah Pertama, AMS untuk Sekolah Menengah Atas, *Kweekschool* untuk Sekolah Guru Rendah dan HIK untuk Sekolah Guru

⁷⁵ *Ibid*

Atas. Bedanya hanya tambahan nama Muhammadiyah di belakangnya (misalnya, HIS Muhammadiyah) dan tambahan pemberian pelajaran agama. Begitupula untuk madrasahnyanya, seperti Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah (untuk putra) dan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah (untuk putri). Selain itu juga ada tambahan pelajaran bahasa asing (Arab, Inggris, dan Belanda).⁷⁶

Apa yang dilakukan K. H. Ahmad Dahlan tersebut ternyata diapresiasi Harry J. Benda dalam *The Crescent and the Rising Sun* (1983). Keberhasilan Muhammadiyah yang luar biasa, kata Benda, terletak pada kegiatan-kegiatan pendidikan dikalangan orang-orang tua dan pemuda. Sekolah-sekolahnya termasuk beberapa yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, mengajarkan silabus modern yang memadukan pendidikan umum dan pendidikan gaya Barat maupun pengajaran agama berdasarkan pelajaran bahasa Arab dan tafsir al-Qur'an.

Jadi secara kelembagaan, pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah terkesan masih dikelola dengan cara-cara tradisional yang mengakibatkan pengembangan SDM di dalamnya tidak begitu mendapat perhatian serius. Cara-cara tradisional yang dimaksud adalah: (1). Pengelolaan pendidikan terkesan asal-asalan tidak profesional sebagaimana dituntut manajemen modern, (2). Orientasi pendirian dan pelaksanaan pendidikannya sekadar mengikuti arus kebutuhan formalisasi jenjang pendidikan. Dalam orientasi dan praktek pendidikan semacam ini pendidikan tidak lebih sebagai

⁷⁶*Ibid...* h.118

konsumsi dan bukan sebagai investasi. Sebagai bahan konsumsi, pendidikan cenderung dianggap sebagai produksi misal dengan harga yang ingin ditekan serendah mungkin. Akibatnya, pendidikan menjadi semacam komoditi dengan kualitas rendah. Dan akibat selanjutnya, proses pendidikan didalamnya terkesan formalistik, tidak ada sedikitpun nuansa pengembangan keilmuan.

A. Malik Fadjar mengingatkan pola lama tersebut harus segera diganti dengan pola yang baru yang lebih melihat lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai bagian dari proses modernisasi dan industriliasi. Maka sudah saatnya lembaga pendidikan Muhammadiyah dipandang sebagai suatu investasi yang ingin dalam arti yang seluas-luasnya dan bukan hanya ingin memproduksi manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan bukan hanya ingin memproduksi selembar ijazah.⁷⁷

Pilihan tersebut menurut A. Malik Fadjar tidak dapat ditunda, Karena kalau melihat kecenderungan besar (*megatrend*) dalam dunia pendidikan saat ini, masyarakat sudah mulai memandang pendidikan sebagai investasi. Kecenderungan lama yang memandang pendidikan sebagai konsumsi-yaitu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai hanya untuk keperluan yang bersifat sementara sudah mulai memudar.

Hal ini ditegaskan A. Malik Fadjar terlihat dari semakin selektif dan rasionalnya masyarakat dalam memilih pendidikan meskipun harus membayar mahal. Bagi mereka, biaya mahal bukanlah persoalan, karena

⁷⁷ *Ibid*

sebagai suatu investasi, biaya yang dikeluarkan tersebut mempunyai nilai imbalan (*rate of return*) yang tinggi di masa depan dalam bentuk kemudahan memasuki lapangan pekerjaan.

Tuntutan yang semakin rasional, realistik, dan selektif disatu pihak, ditambah dengan kebutuhan pembangunan di bidang penyediaan SDM yang berkualitas di pihak lain, tidak pelak lagi menuntut dikembangkannya suatu infrastruktur pendidikan yang mahal. Meminjam analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*) pendidikan yang dikelola Muhammadiyah semestinya dapat berperan lebih besar.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid.*, h.120